



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 23 Juni 2020
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pembicaraan Pendahuluan dan Pembahasan RAPBN TA 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021; 2. Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020 (hingga bulan Juni Tahun 2020).
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 12 (dua belas) Anggota Komisi II DPR RI secara fisik dan 17 (tujuh belas) Anggota Komisi II DPR RI secara virtual dari 49 (empat puluh Sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan agenda pembicaraan pendahuluan dan pembahasan RAPBN TA 2021 dan rencana kerja Pemerintah Tahun 2021 dan evaluasi kinerja Tahun 2019 dan 2020 (hingga bulan Juni Tahun 2020), hari Selasa, 23 Juni 2020, dibuka pukul 14.10 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada rapat tersebut, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyampaikan Pagu Indikatif Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebesar **Rp8.667.115.137.000,-** (*delapan triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar seratus lima belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) dengan kenaikan dari Tahun 2019 sebesar 7,48%.

III. KESIMPULAN RAPAT

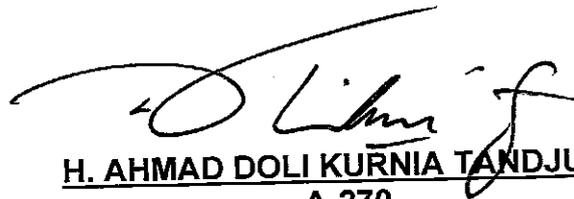
1. Setelah mendengarkan dan memahami penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2021 Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (Kementerian ATR/BPN) sebesar **Rp8.667.115.137.000,-** (*delapan triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar seratus lima belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), Komisi II DPR RI meminta agar dalam pengalokasian anggaran per program dan kegiatan senantiasa memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali secara lebih mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2021 selanjutnya.
2. Komisi II DPR RI mendorong percepatan program PTSL, tanpa mengurangi kinerja dan capaian Kementerian ATR/BPN pada program-program lainnya.
3. Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN menyepakati untuk membentuk tim bersama yang akan bertugas untuk memberikan respon dan menindaklanjuti berbagai pengaduan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi II DPR RI.
4. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mensosialisasikan program-program dan kebijakan Kementerian ATR/BPN agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

5. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN agar segera melakukan komunikasi dan koordinasi dalam internal Pemerintah dalam rangka mendorong Kantor Pertanahan di daerah menjadi salah satu unsur dalam Forkopimda.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 23 Juni 2020
KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270